

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR (STUDI: INDONESIA)

Petters Neldy Suvana Feoh

Universitas Gadjah Mada

Abstract

Blue economy development in coastal areas has great potential to have a significant impact on poverty alleviation efforts by utilizing sustainable marine resources that will create new jobs and drive community economic growth through the fisheries and tourism sectors. Collaboration among stakeholders, including the government, private sector, non-governmental organizations, and local communities, is crucial to ensure that the benefits are felt by vulnerable groups in coastal areas. This research aims to analyze how local stakeholder collaboration in blue economy development can contribute to poverty alleviation in coastal areas. The method used in this research is the analysis of printed and electronic documents from the internet with a study focus on Indonesia, this research reveals that effective collaboration between actors can improve the implementation of blue economy programs that have a direct impact on improving the welfare of coastal communities. The findings in this study indicate that the involvement of the private sector in technological innovation and the support of local communities in sustainable natural resource management are the main keys in creating inclusive and competitive development.

Keywords: Blue Economy, Collaboration, Poverty Alleviation, Indonesia.

Abstrak

Pengembangan ekonomi biru di wilayah pesisir memiliki potensi besar yang berdampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan sumberdaya laut yang berkelanjutan akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui sektor perikanan dan pariwisata. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, Sektor Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat lokal, sangat penting untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh kelompok-kelompok rentan di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kolaborasi pemangku kepentingan lokal dalam pengembangan ekonomi biru dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen cetak maupun elektronik dari internet dengan fokus studi di Indonesia, penelitian ini mengungkapkan bahwa kolaborasi yang efektif antar aktor-aktor mampu meningkatkan implementasi program-program ekonomi biru yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam inovasi teknologi serta dukungan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan memiliki daya saing

Kata Kunci: Ekonomi Biru, Kolaborasi, Pengentasan Kemiskinan, Indonesia

Article history:

Submission: September 17, 2024

Revised: September 25, 2024

Accepted: October 29, 2024

Published: December 09, 2024

*Corresponding author

Email:

pettersneldysuvanafeoh@mail.ugm.ac.id

PENDAHULUAN

Kolaborasi pemangku kepentingan diperlukan untuk kebaikan yang lebih besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (Almulhim et al., 2024). Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting bagi Pemerintah, NGO, Swasta sebagai aktor yang turut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan (Bingham, L.B., Nabatchi, T. and O'Leary, 2005). Selain itu, untuk menciptakan regulasi maupun program yang mendukung pengembangan ekonomi biru dan pengentasan kemiskinan perlu adanya dukungan sektor swasta, dengan sumber daya dan teknologinya yang dapat berperan dalam inovasi dan investasi. Selain itu, organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal dapat menyediakan dukungan berbasis masyarakat serta memastikan keberlanjutan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan program-program tersebut. Kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan publik merupakan tata kelola kolaboratif yang melibatkan semua aktor kepentingan untuk menyelesaikan masalah publik (Ansell & Gash, 2008).

Pengembangan ekonomi biru saat ini sangat bergantung pada peran pemangku kepentingan karena bisa berpengaruh terhadap pelaksanaan ekonomi biru (Tirumala & Tiwari, 2022). Penerapan ekonomi biru yang dilakukan oleh pemangku kepentingan melalui kolaborasi diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Mukhopadhyay, R., Loveson, VJ, Iyer, SD, 2020). Fokus masalah yang mendasar adalah kurangnya kolaborasi antar aktor pemangku kepentingan yang efektif seperti pemerintah, non-pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. Keadaan ini menjadi penghambatan dalam memaksimalkan potensi ekonomi biru secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Dengan melibatkan seluruh aktor pemangku kepentingan secara aktif dan kolaborasi yang efektif, pengembangan ekonomi biru dapat dirancang sedemikian rupa sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat pesisir yang selama ini menjadi kelompok paling rentan karena sektor perikanan dan kelautan menjadi jaminan untuk pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan memerlukan kolaborasi multisektoral.

Kemiskinan yang melanda wilayah pesisir sering kali disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat terhadap peluang ekonomi yang dapat diandalkan. Di sisi lain, berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, serta komunitas lokal memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi ekonomi biru di daerah. Namun, potensi ini belum sepenuhnya digali dan dimanfaatkan secara optimal, terutama karena kurangnya kolaborasi yang efektif di antara pemangku kepentingan tersebut. (Pauli, G. A., 2010) dalam bukunya yang berjudul *The Blue Economy: 10 Years. 100 Innovations. 100 Million Jobs* bahwa produk unggulan serta pemanfaatan teknologi dapat memperbaharui cara memanfaatkan dan memaksimalkan potensi sumber daya laut untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, (*the European Union blue economy report*, 2020) Menyebutkan ekonomi biru bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup dan inklusif sosial tanpa mengorbankan keberlanjutan laut dan pesisir karena pada dasarnya sumber daya laut terbatas.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan 17.504 pulau, 95.181 Km² garis pantai dan wilayah laut seluas 5,4 juta Km² (Dirhamsyah et al., 2022). Lebih lanjut di katakan bahwa, sejarah maritim sudah dimulai sejak 2.500 tahun saat migrasi Austronesia dengan memanfaatkan jalur perdagangan laut di Asia. Kerjasama perdagangan membentuk kekuatan

politik dan menciptakan kemajemukan di Indonesia saat ini. Di Indonesia Ekonomi Biru merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Potensi laut Indonesia yang sangat besar karena menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dan memiliki banyak pulau-pulau yang terdapat keanekaragaman hayati laut serta sumber daya laut yang melimpah (Putri et al., 2022). Oleh karena itu, apabila potensi produk unggulan ini di kelola dan dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi sektor utama yang akan mendorong pengembangan ekonomi biru dan pengentasan kemiskinan di daerah pesisir. Kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir menjadi penting untuk diketahui dan dipahami oleh aktor pemangku kepentingan yang berkolaborasi (JB Bryson, Barbara C. Crosby, 2006). Kolaborasi pemangku kepentingan lokal ini melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir, walaupun dalam penerapannya masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan perbedaan kepentingan antar aktor (Bingham, L.B., Nabatchi, T. and O'Leary, 2005; Stott & Murphy, 2020). Peran kolaborasi pemangku kepentingan lokal sangatlah signifikan dalam mendorong pengembangan ekonomi biru dalam upaya pengentasan kemiskinan (Evans et al., 2023).

Kajian penelitian sebelumnya telah menyoroti tentang pengembangan ekonomi biru terhadap pengentasan kemiskinan, tetapi belum secara spesifik menjelaskan tentang kolaborasi pemangku kepentingan lokal. Penelitian (Apriliana et al., 2024) menyoroti tentang pengaruh jumlah nelayan dan kapal tangkap terhadap tingkat kemiskinan. Namun, dalam penelitian ini tidak membahas lebih lanjut bagaimana aktor-aktor pemangku kepentingan lokal berkolaborasi untuk pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Selain itu, (Darajati, 2023; Khoiriyah, 2024; Prasutiyon, 2018; Setyawati et al., 2021; Taebenu, 2020) juga mengkaji tentang konsep ekonomi biru terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penggunaan sumber daya tetapi studi ini hanya membahas sebatas implementasi konsep ekonomi biru tanpa menjelaskan kolaborasi pemangku kepentingan lokal dalam pengembangan ekonomi biru terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Lebih lanjut, (Surya Bakti & Lukman Nuzul Hakim, 2024) dalam penelitiannya tentang bagaimana ekonomi biru dan kepemimpinan strategik bekerjasama dalam menciptakan keberlanjutan. Meskipun telah membahas tentang kerjasama, fokus pada penelitian ini hanya pada strategi kepemimpinan tanpa menyoroti secara khusus bagaimana aktor-aktor pemangku kepentingan berkolaborasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Penelitian (Cisneros-Montemayor et al., 2019; Saksono, 2013) juga memberikan wawasan tentang manfaat sosial dan program yang diintegrasikan dengan ekonomi biru. Namun, belum secara mendalam melihat kolaborasi pemangku kepentingan lokal terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.

Penelitian kolaborasi antar aktor pemangku kepentingan dalam konteks pengembangan ekonomi biru terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir masih jarang dilakukan yang menyebabkan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan atau kesenjangan dalam penelitian sebelumnya dengan menyoroti bagaimana para aktor pemangku kepentingan berkolaborasi dalam pengembangan ekonomi biru untuk pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Dengan mengatasi kesenjangan penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran strategis kolaborasi antar pemangku kepentingan dan bagaimana hal ini dapat

diimplementasikan untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di wilayah pesisir.

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis dokumen. Analisis dokumen adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meninjau dan menganalisis dokumen secara komprehensif, baik yang berbasis cetak maupun elektronik dari internet untuk menarik makna, memperoleh pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan empiris dalam penyelidikan sosial, khususnya studi kasus kualitatif tertentu (Kutsyuruba, 2023). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu buku, artikel, jurnal, dan laporan media internasional. Lebih lanjut, Langkah sistematis yang dilakukan untuk menemukan wawasan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah menemukan, memilih, memilah, memahami, dan mensintesa data berdasarkan dokumen-dokumen tersebut. Setiap dokumen dievaluasi agar yang diambil hanya dari sumber yang memiliki kredibilitas dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik. Fokus utama analisis adalah mengidentifikasi bagaimana pemangku kepentingan lokal, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, NGO, dan komunitas, berperan dalam pengembangan ekonomi biru serta bagaimana kolaborasi mereka dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan untuk menentukan tema yang relevan dengan penelitian. Ada 3 langkah dalam proses analisis. Pertama, tema-tema penting seperti peran masing-masing pemangku kepentingan, faktor pendukung dan penghambat kolaborasi, serta dampak program ekonomi biru. Kedua, tema-tema tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang lebih spesifik untuk memudahkan analisis mendalam. Ketiga, data yang telah dikelompokkan dianalisis lebih lanjut melalui penafsiran, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga ketelitian dan validitas penelitian, diterapkan beberapa strategi, seperti triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai dokumen untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Selain itu, setiap dokumen dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki kredibilitas tinggi. Proses analisis juga didokumentasikan secara transparan melalui audit trail, sehingga langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini dapat ditelusuri dan diverifikasi jika diperlukan di masa mendatang.

Dengan metode analisis dokumen ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi biru dan perannya dalam pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam literatur terkait dan memberikan kontribusi nyata bagi pemangku kebijakan serta aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan ekonomi biru di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini melihat bagaimana kolaborasi pemangku kepentingan lokal dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dalam konteks pengembangan ekonomi biru. Selain itu, dalam penelitian ini juga menyoroti tantangan dan peran sebagai bagian untuk

memperkuat kolaborasi antar aktor. Hasil penelitian ini berdasarkan analisis dokumen sekunder. Berikut adalah hasil penelitian yang disusun secara sistematis berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari berbagai sumber.

Kolaborasi Aktor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas aktor dan sektor antara pemerintah, NGO, sektor swasta, dan komunitas lokal berperan penting dalam pengembangan ekonomi biru di wilayah pesisir. Setiap aktor memiliki kontribusi yang spesifik dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyediakan kebijakan dan regulasi, sektor swasta dan NGO berperan melalui inovasi dan investasi, sementara komunitas lokal memastikan keberlanjutan program serta menjaga keadilan sosial. Contoh nyata dari kolaborasi yang berhasil adalah program pariwisata berbasis komunitas di Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Program ini melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata dan berhasil meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat keterlibatan sosial masyarakat setempat (Manaf et al., 2018). Kolaborasi seperti ini menjadi bukti bahwa pelibatan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Dampak Ekonomi Biru terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Implementasi ekonomi biru yang melibatkan berbagai aktor telah berkontribusi secara nyata pada pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Program-program seperti budidaya perikanan berkelanjutan, pariwisata berbasis komunitas, dan pemanfaatan sumber daya laut telah membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Data dari (World Bank, 2021) menyebutkan bahwa sektor kelautan berkontribusi sebesar 27 miliar dolar AS terhadap PDB Indonesia dan menciptakan 7 juta lapangan kerja. Selain itu, menurut (BPS, 2023), tingkat kemiskinan nasional menurun dari 10,14% pada 2021 menjadi 9,36% pada 2023. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi biru melalui kolaborasi efektif mampu menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Namun, meskipun data menunjukkan dampak positif, interpretasi lebih mendalam diperlukan. Meskipun ekonomi biru memberikan manfaat nyata, hasil program sangat bergantung pada kualitas kolaborasi yang terjalin antar aktor. Ini menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, faktor sosial seperti keberlanjutan dan keterlibatan komunitas lokal juga sangat mempengaruhi keberhasilan.

Tantangan dalam Kolaborasi Aktor

Penelitian ini juga menemukan tantangan signifikan dalam kolaborasi lintas aktor. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kepentingan dan prioritas antar pemangku kepentingan, yang terkadang menimbulkan konflik dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa aktor lebih fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, sementara yang lain lebih mengutamakan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya di beberapa wilayah pesisir menjadi hambatan dalam implementasi program ekonomi biru. Sektor pariwisata dan perikanan sering kali mengalami ketegangan karena alokasi sumber daya yang terbatas. Tantangan ini menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik untuk mencapai sinergi antar aktor (Zimmermann et al., 2022).

Tantangan juga terjadi di beberapa daerah pesisir di Indonesia, hal ini terjadi karena kolaborasi aktor yang tidak berjalan dengan baik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antar aktor. Dalam studi kasus di beberapa daerah pesisir di Indonesia menunjukkan tantangan

dalam kolaborasi aktor. Seperti di Pulau Bali, yang merupakan salah satu dari sekian banyak destinasi pariwisata premium mengalami tekanan yang cukup besar pada sumber daya laut khususnya sektor perikanan. Hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan antara masyarakat dan sektor swasta, dimana nelayan ingin mendapatkan akses ke sumber daya laut sebagai mata pencaharian tetapi jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara yang terus meningkat mengakibatkan nelayan lokal tergerus karena akses terhadap hasil laut dibatasi oleh pembangunan infrastruktur pariwisata (Riani, 2021). Ketika akses nelayan terbatas maka akan menimbulkan tantangan dalam kolaborasi yang seharusnya aktor-aktor pemangku kepentingan dapat bekerjasama.

Selain itu, wilayah pesisir Pulau Bintan, Kepulauan Riau juga memunculkan persoalan yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan industri. Pertumbuhan ini menyebabkan penurunan area tangkap nelayan, dengan pembangunan resort dan pelabuhan yang mengurangi akses mereka terhadap sumber daya laut. Menurut (Ferizone, F., & Prastiyo, 2020) konflik yang terjadi antara nelayan lokal dan pengembang pariwisata karena terjadi eksploitasi wilayah pesisir berlebihan yang tidak terintegrasi. Masalah lainnya juga terjadi Pulau Rempang yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dan kegiatan ekonomi pariwisata (Fahlevi et al., 2024). Dalam mengatasi tantangan kolaborasi aktor ini, perlu dibentuk Forum Kolaborasi Pesisir yang melibatkan para aktor seperti nelayan, pemerintah, dan swasta untuk menciptakan rencana pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan di pesisir. Selain itu, program penanaman mangrove dilaksanakan untuk melindungi ekosistem pesisir, disertai dengan pelatihan bagi nelayan untuk meningkatkan kualitas produk perikanan mereka.

Melalui studi kasus ini, terlihat bahwa tantangan kolaborasi antar aktor di daerah pesisir Indonesia sangat kompleks, melibatkan perbedaan kepentingan, alokasi sumber daya yang terbatas, serta dampak lingkungan yang signifikan. Namun, dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Peran Inovasi dan Teknologi dalam Kolaborasi

Penelitian ini menemukan bahwa adopsi inovasi teknologi oleh sektor swasta menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kolaborasi. Teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam sektor perikanan, teknologi ramah lingkungan telah diterapkan untuk meningkatkan hasil tangkap, sedangkan dalam pariwisata, teknologi modern membantu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan layanan wisata (Laktuka et al., 2023). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya inovasi sebagai bagian dari strategi ekonomi biru. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua komunitas pesisir memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini, yang dapat menciptakan kesenjangan baru. Oleh karena itu, pemerintah dan LSM perlu memastikan bahwa inovasi dan teknologi dapat diakses secara merata oleh semua aktor untuk memperkuat keberhasilan kolaborasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas aktor antara pemerintah, sektor swasta, non-pemerintah/LSM, dan komunitas lokal memegang peranan penting dalam

pengembangan ekonomi biru dan berkontribusi signifikan pada pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Indonesia. Setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi; pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, sektor swasta berinvestasi dan memperkenalkan inovasi teknologi, sedangkan komunitas lokal memastikan keberlanjutan program dan menjaga keadilan sosial. Keberhasilan program seperti pariwisata berbasis komunitas di Desa Nglanggeran, Yogyakarta, menggarisbawahi bahwa keterlibatan aktif masyarakat setempat mampu menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tantangan kolaborasi yang perlu diatasi, terutama terkait perbedaan kepentingan dan keterbatasan infrastruktur. Konflik di sektor perikanan dan pariwisata serta ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya menjadi hambatan dalam menjaga keberlanjutan program ekonomi biru. Selain itu, inovasi dan teknologi terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi, namun akses yang merata terhadap teknologi ini harus dijamin agar tidak menimbulkan kesenjangan baru di antara pemangku kepentingan.

Implikasi dari temuan penelitian ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan komprehensif yang mendukung tata kelola kolaboratif dan memperkuat sinergi antar aktor. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan memastikan bahwa kerangka kerja kolaboratif mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara sektor swasta dan NGO untuk mengintegrasikan inovasi yang ramah lingkungan ke dalam program ekonomi biru. Pelibatan aktif komunitas lokal juga perlu diprioritaskan agar program-program yang dijalankan lebih relevan dan berkelanjutan. Dari perspektif penelitian, temuan ini membuka peluang untuk studi lebih lanjut dengan observasi dan wawancara langsung di lapangan guna memperkaya pemahaman tentang dinamika kolaborasi di berbagai konteks wilayah pesisir. Selain itu, penelitian mendalam tentang aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi keberhasilan ekonomi biru juga sangat dibutuhkan.

Secara keseluruhan, kolaborasi yang efektif dan inovasi teknologi yang terintegrasi dengan baik memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi biru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemangku kepentingan harus terus berkomitmen untuk menjalankan program dengan prinsip inklusivitas dan berkelanjutan, agar manfaat ekonomi biru dapat dirasakan secara luas dan berdampak positif dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Almulhim, A. I., Sharifi, A., Aina, Y. A., Ahmad, S., Mora, L., Filho, W. L., & Abubakar, I. R. (2024). Charting sustainable urban development through a systematic review of SDG11. *Nature Cities*. <https://doi.org/10.1038/s44284-024-00117-6>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriliansa, T., Fathonah, A. N., & Ali, M. (2024). Blue Economy dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 512. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1528>
- Bingham, L.B., Nabatchi, T. and O'Leary, R. (2005). *The New Governance: Practices and*

- Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of Government. *Public Administration Review*, 65(5), 547–558. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00482.x>
- BPS. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia. *Badan Pusat Statistik*, 47, 1–16. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Cisneros-Montemayor, A. M., Moreno-Báez, M., Voyer, M., Allison, E. H., Cheung, W. W. L., Hessing-Lewis, M., Oyinlola, M. A., Singh, G. G., Swartz, W., & Ota, Y. (2019). Social equity and benefits as the nexus of a transformative Blue Economy: A sectoral review of implications. *Marine Policy*, 109 (July). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103702>
- Darajati, M. R. (2023). Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia. *The Journalish: Social and Government*, 4(5), 41–53. <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/599>
- Dirhamsyah, D., Umam, S., & Arifin, Z. (2022). Maritime law enforcement: Indonesia's experience against illegal fishing. *Ocean and Coastal Management*, 229(September), 106304. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106304>
- Evans, L. S., Buchan, P. M., Fortnam, M., Honig, M., & Heaps, L. (2023). Corrigendum: Putting coastal communities at the center of a sustainable blue economy: A review of risks, opportunities, and strategies (*Frontiers in Political Science*, (2023), 4, (1032204), 10.3389/fpos.2022.1032204). *Frontiers in Political Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1182415>
- Fahlevi, R., Djunaid, I. S., Sinambela, F. A., Djati, S. P., & Rahmanita, M. (2024). Dampak Sosial dan Ekonomi Pariwisata dari Konflik Rempang. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3312–3316. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3947>
- Ferizone, F., & Prastiyo, E. B. (2020). *Konflik Sosial Nelayan Pesisir Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*.
- JB Bryson, Barbara C. Crosby, M. M. B. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Khoiriyah, A. Z. (2024). Implementasi Ekonomi Biru Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1331–1356. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4161>
- Kutsyuruba, B. (2023). Document Analysis. In J. M. Okoko, S. Tunison, & K. D. Walker (Eds.), *Varieties of Qualitative Research Methods: Selected Contextual Perspectives* (pp. 139–146). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04394-9_23
- Laktuka, K., Kalnbalkite, A., Sniega, L., Logins, K., & Lauka, D. (2023). Towards the Sustainable Intensification of Aquaculture: Exploring Possible Ways Forward. *Sustainability (Switzerland)*, 15(24). <https://doi.org/10.3390/su152416952>
- Manaf, A., Purbasari, N., Damayanti, M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community-based rural tourism in inter-organizational collaboration: How does it work sustainably? Lessons learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/su10072142>
- Mukhopadhyay, R., Loveson, VJ, Iyer, SD, & S. (2020). *Blue Economy of the Indian Ocean: Resource Economics, Strategic Vision, and Ethical Governance* (1st Editio). <https://doi.org/10.1201/9780429326004>
- Pauli, G. A., & C. of R. (2010). *The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*. *Paradigm* 372

publications.

- Prasutiyon, H. (2018). Paper review konsep ekonomi biru (sebuah potret : Indonesia bukanlah Jakarta). *Ekonomika*, 11, 87–92. https://lldikti7.ristekdikti.go.id/uploadjurnal/4_EkonomikaV11No2Des2018.pdf
- Putri, V. Y., Janice, S. N., & Ramdhan Azzahra, T. (2022). *Seeking the Opportunities and Challenges of Blue Economy Sustainable Development: A Case Study of Sidoarjo, Indonesia*. 16. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083016>
- Riani, N. (2021). Pariwisata Adalah Pisau Bermata 2. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1469–1474.
- Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja*, 05(01), 01–12. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.01-12>
- Setyawati, L. R., Hadistian, Cahya, D. D., Marsetio, Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2021). Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota Sabang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 178–185.
- Stott, L., & Murphy, D. F. (2020). An inclusive approach to partnerships for the SDGs: Using a relationship lens to explore the potential for transformational collaboration. *Sustainability (Switzerland)*, 12(19). <https://doi.org/10.3390/SU12197905>
- Surya Bakti, & Lukman Nuzul Hakim. (2024). Ekonomi Biru dan Kepemimpinan Strategis: Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Kalianda Halok Gagas*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.52655/khg.v7i1.88>
- Taebenu, M. M. (2020). Blue Grabbing Amidst the Application of Blue Economy. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 5(2), 48–71. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v5i2.1380>
- The European Union Blue Economy Report (2020).
- Tirumala, R. D., & Tiwari, P. (2022). Innovative financing mechanism for blue economy projects. *Marine Policy*, 139(April 2020), 104194. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104194>
- World Bank. (2021). Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia. *The World Bank*, 1–80.
- Zimmermann, A., Albers, N., & Kenter, J. O. (2022). Deliberating Our Frames: How Members of Multi-Stakeholder Initiatives Use Shared Frames to Tackle Within-Frame Conflicts Over Sustainability Issues. *Journal of Business Ethics*, 178(3), 757–782. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04789-1>